

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2025, wilayah Sumatra mengalami rangkaian bencana banjir dan tanah longsor yang dipicu oleh curah hujan ekstrem dan kondisi cuaca yang tidak menentu, yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Data resmi pemerintah mencatat adanya korban jiwa, kerusakan infrastruktur strategis, serta pengungsian dalam jumlah besar di berbagai provinsi. Luas wilayah terdampak dan tingginya tingkat kerusakan menjadikan peristiwa ini sebagai krisis nasional yang mendapat perhatian publik secara luas. Kondisi tersebut meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kehadiran negara, khususnya melalui komunikasi publik yang jelas, konsisten, dan dapat dipercaya.

Gambar 1.1
Perkembangan situasi penanganan banjir

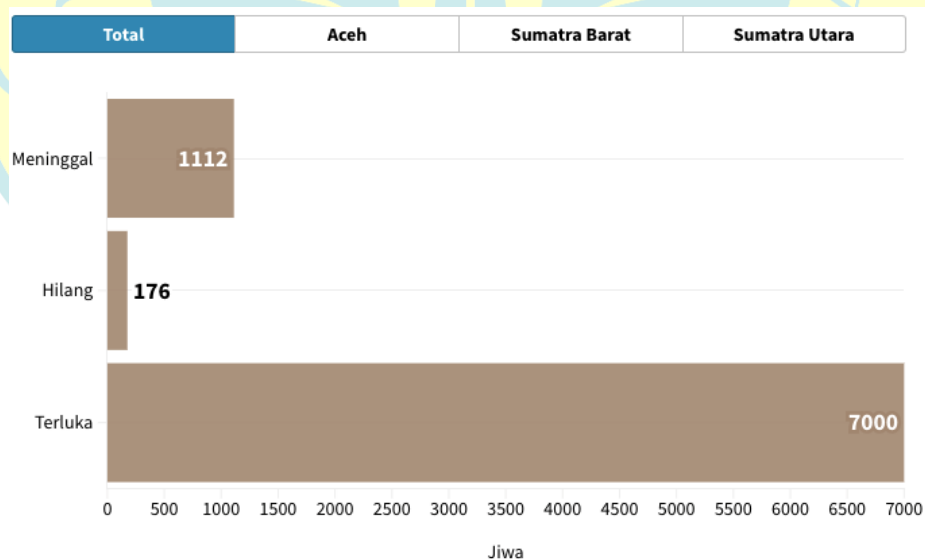


Sumber: BNPB (Diakses pada tanggal 22 desember 2025, pukul 14.00)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadinya sejumlah bencana banjir di wilayah Sumatera Utara yang dipicu oleh faktor hujan berintensitas tinggi. Di Kota Binjai, hujan berintensitas tinggi menyebabkan meluapnya Sungai Bingai, Mencirim, dan Bangkatan sehingga menggenangi permukiman warga dan berdampak pada 5.818 kepala keluarga atau 19.349 jiwa di 21 kelurahan. Banjir juga terjadi di Kota Tebing Tinggi akibat meluapnya Sungai Padang dan Bahilang, yang berdampak pada 5.054 kepala keluarga atau 13.337 jiwa serta merendam 4.080 unit rumah. Menanggapi kondisi tersebut, BPBD setempat melakukan penanganan darurat melalui pendirian dapur umum, pos pengungsian, dan penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak (BNPB, 2025).

Gambar 1.2

Jumlah Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatra



Sumber: dataindonesia.id (Diakses pada tanggal 24 desember 2025, pukul 15.00)

Berdasarkan grafik diatas jumlah korban akibat bencana banjir di Sumatra terus meningkat, dengan total korban meninggal dunia mencapai 1.112 orang

berdasarkan data BNPB per 24 Desember 2025 pukul 07.30 WIB. Selain itu, sebanyak 176 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka di berbagai wilayah terdampak. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yakni 483 orang meninggal, 32 orang hilang, dan sekitar 4.300 orang luka-luka. Sementara itu, Sumatra Barat mencatat 260 korban meninggal dan Sumatra Utara 369 korban meninggal, dengan ratusan korban luka-luka dan puluhan orang masih hilang di kedua provinsi tersebut (Perdana, 2025). Dalam kondisi darurat seperti ini, penyampaian informasi publik menjadi aspek krusial karena berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat, menenangkan situasi, serta menunjukkan kehadiran dan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana.

Di era digital, media sosial telah menjadi salah satu sarana utama komunikasi publik, termasuk bagi lembaga negara. Instagram, sebagai *platform* berbasis visual dengan jangkauan luas, dimanfaatkan oleh berbagai institusi pemerintahan untuk menyampaikan informasi, kebijakan, serta respons terhadap peristiwa penting (Noor et al., 2025). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga legislatif negara turut menggunakan akun Instagram resminya sebagai media komunikasi dengan masyarakat. Melalui akun tersebut, DPR RI menyampaikan berbagai pemberitaan, termasuk terkait sikap, peran, dan langkah-langkah yang diambil dalam merespons bencana di Sumatera pada tahun 2025.

Dalam menjalankan fungsi keterbukaan informasi dan menyerap aspirasi publik di era digital, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

mengoptimalkan media sosial melalui akun Instagram resmi terverifikasi, yaitu @DPR_RI. Akun ini mulai aktif membagikan konten sejak Agustus 2014 dan dikelola secara untuk membangun transparansi antara lembaga legislatif dan masyarakat. Hingga masa penelitian ini berjalan pada Mei 2026, akun @DPR_RI telah menjangkau masyarakat secara luas dengan total pengikut (followers) mencapai 1,1 Juta dan akumulasi unggahan sebanyak 16,7 Ribu *postingan*. Aktivitas digital yang tinggi ini menunjukkan bahwa Instagram menjadi salah satu kanal utama DPR RI dalam mempublikasikan kinerja parlemen secara visual dan interaktif

Secara umum, gambaran konten dan *postingan* harian yang disajikan oleh akun @DPR_RI rata-rata berfokus pada visualisasi tiga fungsi utama DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Konten tersebut didominasi oleh:

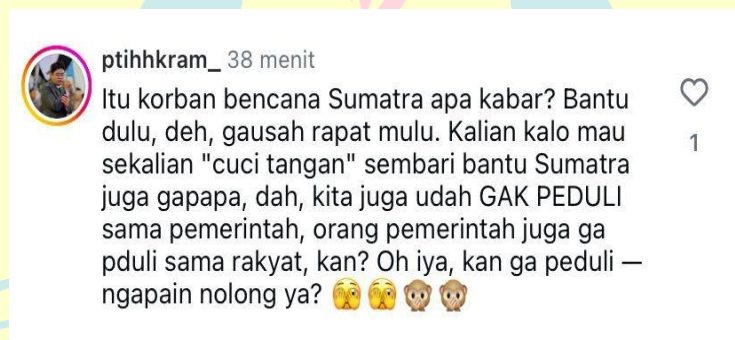
1. Infografis dan Edukasi: Penjelasan mengenai rancangan undang-undang (RUU), alokasi anggaran negara, serta mekanisme pembuatan kebijakan publik.
2. Dokumentasi Kegiatan Parlemen: Foto resmi dan *video* singkat (*Reels*) yang meliputi jalannya Rapat Paripurna, rapat kerja komisi, serta kunjungan kerja anggota dewan ke berbagai daerah.
3. Pernyataan Resmi Pimpinan: Komunikasi krisis dan respons kehumasan terkait isu-isu nasional yang sedang berkembang di masyarakat.

DPR RI, sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, turut menyampaikan sikap institusional melalui rapat kerja, pernyataan pimpinan, serta aktivitas komunikasi yang berkaitan dengan

pengawasan penanganan bencana. Keterlibatan ini menjadikan DPR RI sebagai aktor yang ikut membentuk narasi publik mengenai tanggung jawab dan kinerja negara dalam situasi krisis. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial DPR RI berperan dalam meningkatkan transparansi kebijakan dan membangun opini publik melalui komunikasi dua arah dengan masyarakat terhadap isu-isu kebijakan publik, termasuk respons terhadap situasi krisis (William & Loisa, 2025).

Gambar 1.3

Komentar Kritik Warganet terhadap DPR RI mengenai Bencana Sumatera



Sumber: Komentar Akun Instagram DPR RI (Diakses pada tanggal 24 Desember 2025, pukul 16.00)

Pesan yang disampaikan oleh lembaga negara tidak sepenuhnya diterima secara seragam oleh publik. Sejumlah pemberitaan media dan percakapan warganet menunjukkan adanya kritik terhadap narasi resmi yang dinilai terlalu prosedural dan birokratis. Kritik tersebut semakin menguat ketika pernyataan elite politik dianggap tidak mencerminkan kondisi korban di lapangan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya jarak antara pesan institusional dan pengalaman empiris masyarakat terdampak bencana.

Gambar 1.4

Unggahan Akun Resmi Instagram @dpr_ri Mengenai Bencana Sumatera



Sumber: Komentar Akun Instagram DPR RI (Diakses pada tanggal 24 Desember 2025, pukul 16.05)

Berdasarkan Unggahan akun resmi Instagram @dpr_ri menampilkan visual udara dampak bencana di wilayah Sumatera dengan narasi “Breaking News” dan “Pray for Sumatera”. Secara visual, gambar memperlihatkan kerusakan lingkungan dan permukiman akibat bencana hidrometeorologis yang dibingkai dengan desain gelap untuk menegaskan situasi darurat dan rasa duka. Penggunaan diksi tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan pesan yang lebih menekankan sisi solidaritas moral. Kecenderungan inilah yang akan dikaji lebih dalam dalam penelitian ini untuk melihat apakah pesan tersebut sejalan dengan teori *SCCT* atau justru memperlebar kesenjangan ekspektasi publik.

Keterlibatan DPR RI dalam bencana Sumatra 2025 dipersepsikan publik masih terbatas pada aktivitas formal, sementara masyarakat menuntut komunikasi yang lebih substantif dan responsif terhadap penderitaan korban. Ketidaksesuaian antara narasi resmi dan ekspektasi publik menunjukkan adanya krisis komunikasi lembaga negara di tengah krisis kemanusiaan (Suwanda & Suwanda, 2025). Dalam

situasi ini, intensitas komunikasi yang tinggi tidak menjamin efektivitas apabila strategi pesan tidak selaras dengan empati dan akuntabilitas yang diharapkan publik. Oleh karena itu, komunikasi DPR RI dalam bencana Sumatra 2025 perlu dievaluasi secara strategis untuk mencegah krisis reputasi dan meningkatnya skeptisisme publik (Babatunde, 2022).

Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi krisis sangat bergantung pada kesesuaian antara karakteristik krisis dan respons komunikasi yang ditampilkan oleh organisasi. Dalam konteks bencana alam sebagai krisis eksternal, publik umumnya mengharapkan respons yang menekankan empati dan kepedulian terhadap korban. Munculnya kritik terhadap komunikasi lembaga negara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara karakter krisis dan cara pesan disampaikan, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi publik terhadap institusi (Ayu & Angendari, 2021).

Permasalahan utama bukan sekadar ada atau tidaknya pernyataan resmi, melainkan pada bagaimana strategi respons krisis tersebut disusun. Ada indikasi awal bahwa pesan yang disampaikan cenderung normatif atau prosedural, sehingga diduga berpotensi memicu krisis reputasi baru. Hal inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini untuk membedah secara kritis pilihan strategi komunikasi tersebut (Irhamdhika et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah kesesuaian komunikasi krisis lembaga pemerintah dengan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT), karena tanpa kerangka teoretis yang jelas sulit menilai apakah respons yang disampaikan bersifat adaptif atau justru

kontraproduktif terhadap kepercayaan publik. Kajian komunikasi krisis di Indonesia masih didominasi analisis media dan persepsi publik yang memosisikan komunikasi sebagai hasil akhir, tanpa mengkaji secara mendalam proses konstruksi pesan oleh lembaga pemerintah (M. Sari et al., 2025).

Penerapan *SCCT* lebih banyak digunakan pada organisasi swasta, sementara kajian pada lembaga pemerintah dalam konteks bencana alam masih terbatas, meskipun lembaga publik memiliki legitimasi politik dan tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Lembaga legislatif seperti DPR RI juga jarang diposisikan sebagai aktor komunikasi krisis, padahal pernyataan institusionalnya turut membentuk atribusi tanggung jawab publik, sehingga kondisi ini menciptakan celah analisis yang signifikan (Hutagalung et al., 2025).

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini menempatkan DPR RI sebagai subjek analisis dalam konteks komunikasi krisis bencana Sumatra tahun 2025. Untuk membedah fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan observasi pada akun Instagram resmi @dpr_ri sebagai objek material kajian. Pemilihan *platform* Instagram didasarkan pada posisinya sebagai representasi visual dan tekstual utama lembaga di ruang digital, tempat di mana institusi secara aktif berinteraksi langsung dengan atensi publik terkait situasi bencana.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)* untuk menelaah kesesuaian antara karakteristik krisis bencana dan respons komunikasi yang ditampilkan DPR RI melalui pendekatan analisis isi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi secara sistematis terhadap kategori-kategori pesan dalam komunikasi publik DPR RI.

Melalui analisis ini, peneliti ingin memetakan bagaimana kecenderungan strategi respons krisis yang dipilih institusi dalam menghadapi isu bencana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai respons krisis lembaga legislatif sekaligus berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi krisis di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Respons krisis DPR RI dalam isu bencana Sumatra tahun 2025 masih relatif jarang dikaji sebagai bagian dari komunikasi krisis lembaga negara, khususnya lembaga legislatif.
2. Komunikasi publik DPR RI di media digital dalam konteks bencana menimbulkan beragam respons dan penilaian publik terkait peran, kehadiran, serta tanggung jawab institusi dalam situasi krisis.
3. Kesesuaian antara karakter krisis bencana alam dan bentuk respons krisis DPR RI belum banyak dianalisis menggunakan kerangka *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*.

1.3 Keunikan Penelitian

Penelitian ini memiliki keunikan karena menempatkan DPR RI sebagai aktor komunikasi krisis dalam konteks bencana alam. Selama ini, kajian komunikasi krisis lebih banyak berfokus pada lembaga eksekutif atau organisasi

non-pemerintah, sementara peran lembaga legislatif dalam membangun komunikasi publik relatif jarang dikaji.

Keunikan lain terletak pada penerapan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) untuk menganalisis komunikasi krisis lembaga negara dalam bencana hidrometeorologi. Penggunaan SCCT dalam konteks DPR RI memungkinkan analisis yang lebih terarah terhadap strategi komunikasi yang digunakan dan kesesuaiannya dengan karakter krisis yang dihadapi.

1.4 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan secara spesifik pada analisis respons komunikasi krisis Instagram DPR RI dalam pemberitaan bencana Sumatra tahun 2025 berdasarkan kerangka *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT). Penelitian ini hanya mengkaji konten komunikasi publik resmi Instagram DPR RI pada periode yang berkaitan langsung dengan peristiwa bencana tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi, sehingga penelitian tidak mencakup survei persepsi publik. Dengan demikian, fokus penelitian dibatasi pada bagaimana pesan respons krisis DPR RI dikonstruksikan, dibingkai, dan dikategorikan sesuai SCCT, tanpa memperluas analisis pada aspek efektivitas kebijakan atau dampak komunikasi terhadap masyarakat.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana respons krisis yang ditampilkan oleh Instagram

DPR RI dalam isu bencana Sumatra tahun 2025 jika dianalisis berdasarkan *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*?”

1.6 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis respons krisis Instagram DPR RI dalam isu bencana Sumatra tahun 2025 dengan menelaah kesesuaian antara karakter krisis eksternal dan bentuk respons komunikasi yang ditampilkan. Analisis dilakukan melalui pendekatan analisis isi dengan menitikberatkan pada dimensi utama *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*, khususnya atribusi tanggung jawab krisis dan kategori respons krisis yang tercermin dalam komunikasi publik DPR RI.

1.7 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons krisis yang ditampilkan oleh Instagram DPR RI dalam isu bencana Sumatra tahun 2025 berdasarkan kerangka *Situational Crisis Communication Theory (SCCT)*.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami komunikasi krisis sebagai bagian integral dari respons kelembagaan negara dalam situasi bencana. Dengan menelaah strategi komunikasi krisis DPR RI melalui kerangka *Situational Crisis Communication Theory*, penelitian ini menempatkan komunikasi tidak sekadar sebagai aktivitas penyampaian informasi, tetapi sebagai

proses strategis yang berkaitan dengan pengelolaan makna, tanggung jawab, dan persepsi publik. Secara akademik dan praktis, penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman mengenai dinamika komunikasi krisis lembaga negara dalam konteks bencana alam di Indonesia.

1.8.1 Manfaat Penelitian Akademis

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi krisis dengan memperluas objek analisis dari organisasi korporasi dan media menuju lembaga pemerintah, khususnya lembaga legislatif. Analisis terhadap respons krisis DPR RI dalam isu bencana Sumatra tahun 2025 memungkinkan pengujian penerapan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dalam konteks bencana alam yang melibatkan institusi publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memperkaya perspektif Ilmu Komunikasi dengan menempatkan DPR RI sebagai aktor komunikasi krisis yang turut membentuk atribusi tanggung jawab dan persepsi publik, tidak semata-mata sebagai institusi legislasi dan pengawasan

1.8.2 Manfaat Penelitian Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi DPR RI dalam memahami implikasi komunikasi publik yang ditampilkan oleh lembaga dan anggotanya dalam situasi krisis bencana. Temuan penelitian ini juga relevan bagi praktisi humas dan komunikasi publik pemerintahan dalam merumuskan dan menyampaikan pesan krisis yang selaras dengan karakteristik krisis serta ekspektasi publik. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini memberikan dasar analitis untuk memahami bagaimana konstruksi pesan krisis di media digital memengaruhi

persepsi publik, sehingga dapat mendukung pengelolaan komunikasi kelembagaan yang lebih adaptif dan bertanggung jawab dalam menghadapi bencana alam.



Intelligentia - Dignitas